

PORTOFOLIO AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dosen Pengampu:

1. Dr. Pujiati, S.Pd., MPd.
2. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh:
Kelompok 8

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Suerna | 2313031081 |
| 2. Nazrey Aditya R | 2313031080 |

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

ANALISIS ARTIKEL

ANALISIS ARTIKEL 1

a. Identitas Artikel

1	Nama Artikel	Jurnal Artikel Universitas Negeri Padang
2	Judul	Pengaruh Ketaatan Pada Perundang-Undangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi
3	Nama Penulis	Husnul Mubaraq
4	Halaman	1 – 19
5	Tahun Terbit	2017

b. Abstrak

Abstrak dalam jurnal ini disajikan dalam bahasa Indonesia. Pada bagian abstrak dijelaskan mengenai masalah-masalah pemerintah tidak pedulinya terhadap perbaikan kinerja yang efektif, penelitian terdahulu, latar belakang peneliti memilih masalah, dan tujuan penelitian yang bermanfaat dalam berbagai sektor.

c. Pendahuluan

Dalam bagian pendahuluan, penulis menjelaskan bahwa pemerintah harus dapat melaporkan keberhasilan yang telah dicapai dan berani mengungkapkan kegagalan yang terjadi berkaitan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang lebih tinggi. Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena semakin banyaknya instansi pemerintah kelihatan ti-dak peduli terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih efisien karena masih banyaknya kinerja instansi pemerintah yang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Keadaan tersebut menimbulkan semakin meningkatnya tuntutan yang diajukan masyarakat kepada pemerintah atas pelayanan publik yang lebih baik.

d. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh ketaatan pada peraturan perundang-undangan, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan

pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bukittinggi.

e. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kausatif atau tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat dengan dua variable atau lebih. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah metode angket atau menyebarluaskan dafatar pertanyaan (kuesioner).

f. Hasil dan Pembahasan

1. Terdapat pengaruh antara variabel sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini diketahui dari hasil uji t yang t hitung $4,895 > t$ tabel $2,007$ dan nilai sig perhitungan $0,000 < 0,05$.
2. Berdasarkan tabel 20 diketahui bahwa koefisien β pemanfaatan teknologi informasi bernilai positif sebesar $0,180$ dan nilai signifikansi $0,169 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa ketatanurut tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 ditolak.
3. Kompetensi aparatur pemerintah bernilai sebesar $0,390$ dan nilai signifikansi $0,028 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima.

g. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ketatanurut pada peraturan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh, dan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif.

h. Kelebihan dan Kekurangan

Dalam artikel pendahuluan dan pemebahasan dijelaskan secara rinci serta lengkap. Sebaiknya peneliti menambahkan abstrak di bagian awal yang tujuannya untuk memudahkan pembaca terkait gambaran artikel ini.

i. Daftar Pustaka

Mubaraq, Husnul. 2017. Pengaruh Ketaatan Pada Perundang-Undangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi. *Universitas Negeri Padang*, hlm 1 - 19.

ANALISIS ARTIKEL 2

a. Identitas Artikel

1	Nama Artikel	Artikel Jurnal Akutansi STIE MDP
2	Judul	Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akutansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Dispensa Prov, Dispensa Kota, dan Dishub Prov).
3	Nama Penulis	Intan Permata Haska Wina & Siti Khairani
4	Halaman	1-15
5	Tahun Terbit	2015

b. Abstrak

Abstrak dalam jurnal ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada bagian abstrak dijelaskan mengenai tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana studi kasus dalam penelitian ini yaitu di Dispensa Kota, Dispensa Prov dan Dishub Prov. Lalu dijelaskan pula terkait sempel dan teknik pengambilan sempel yang digunakan. Dan peneliti juga menyampaikan hasil dari penelitian yang telah dibuktikan dengan perhitungan.

Kata Kunci: Standar Pelaporan, Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas

c. Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan penulis menjelaskan bahwa setiap negara menginginkan pemerintahan yang dapat berupaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan *Good Governance*. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah serta pengawasan yang optimal dari pihak internal maupun pihak eksternal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal. Berdasarkan

d. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kausal atau pendekatan yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/keuangan yang bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Dan Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Nonprobability sampling*.

e. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dari tabel uji parsial diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki nilai thitung > ttabel ($2,326 > 2,037$) dan signifikansi $< 0,05$ ($0,027 < 0,05$) Maka Ho ditolak, artinya Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik secara Parsial berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan, variabel X2 memiliki nilai thitung > t tabel ($4,946 > 2,037$) dan signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) Maka Ho ditolak, artinya Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh secara Parsial dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan berdasarkan tabel 6 hasil uji simultan menunjukkan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

f. Kesimpulan dan Saran

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan apabila kinerja akuntabilitas instansi pemerintah menyajikan laporan keuangan sesuai standar pelaporan akuntansi sektor publik, lalu dibarengi dengan pengawasan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak eksternal dan pihak internal yang dilakukan secara indepedensi, maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

g. Kelebihan dan Kekurangan

Dalam artikel ini peneliti telah mejelaskan materi dengan singkat, jelas serta menyampaikan table hasil perhitungan. Namun, terdapat kekurang yaitu tidak menyampaikan bagian tujuan si peneliti dalam meneliti permasalahan ini.

h. Daftar Pustaka

Wina, Indah Permata, & Siti Khairani. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akutansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi STIE MDP*, hal 1-15.

ANALISIS ARTIKEL 3

a. Identitas Artikel

1	Nama Artikel	Jurnal Artikel Akutansi dan Pendidikan
2	Judul	Perkembangan Penelitian Akutansi Sektor Publik Di Indonesia
3	Nama Penulis	Harumi Puspa Rizky & Doddy Setiawan
4	Halaman	94-116
5	Volume/No/Tahun Terbit	Vol.8/No.2/Oktober 2019
6	e-ISSN	2477-4995

b. Abstrak

Abstrak dalam jurnal ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada bagian abstrak dijelaskan mengenai tujuan penelitian terkait perkembangan penelitian akutansi sektor publik di Indonesia, subjek penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

Kata Kunci: Akuntansi sektor publik, *Charting the field*, dan Penelitian akuntansi

c. Pendahuluan

Dalam pendahuluannya, penulis menjelaskan bahwa akutansi sektor publik sering mengalami perubahan dari sistem tradisional hingga *New Public Management* (NPM). Hal ini merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah mengenai otonomi daerah di mana daerah diberi wewenang untuk menjalankan dan mengurus urusan pemerintah serta pelayanan masyarakat sesuai undang-undang yang berlaku. Beberapa tahun belakangan ini penelitian mengenai akuntansi sektor publik mulai menarik perhatian banyak pihak. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya penelitian di sektor publik pada jurnal-jurnal terakreditasi di Indonesia. Penelitian mengenai akuntansi sektor publik telah banyak diteliti di Indonesia maupun di Luar negri.

d. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode “charting the field” yang dikembangkan oleh Hesford et al. (2007). Pada penelitian ini, peneliti memilih beberapa hasil penelitian mengenai akuntansi sektor publik yang diterbitkan di 22 jurnal terakreditasi per Maret 2019, kemudian mengidentifikasi berdasarkan topik dan metode. Jurnal yang terpilih merupakan jurnal terakreditasi pada sinta 2 per Maret tahun 2019 dengan kata kunci akuntansi, bisnis, dan business

e. Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis 137 artikel yang membahas mengenai akuntansi sektor publik dan diterbitkan pada 22 jurnal terakreditasi di Indonesia dan diklasifikasikan berdasarkan topik dan metode selama 9 tahun mulai tahun 2010-2018. Mayoritas penelitian mengenai akuntansi sektor publik ini diterbitkan di Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL). Topik yang paling banyak dibahas pada penelitian akuntansi sektor publik pada 22 jurnal terakreditasi adalah topik mengenai akuntansi keuangan yaitu pengungkapan laporan keuangan, akuntabilitas kinerja, dan *flypaper effect*. Sementara itu topik yang masih jarang diteliti adalah sistem akuntansi sektor publik dan perpajakan. Pada 22 jurnal yang diteliti selama tahun 2010-2018 metode penelitian yang paling sering digunakan adalah kuantitatif dengan persentase 70% sementara metode kualitatif sebesar 28%. Metode yang paling sering digunakan adalah survei dan archival yang mempunyai persentase masing-masing 34% dan 32%. Pada penelitian ini diketahui bahwa eksperimen masih sangat jarang digunakan oleh peneliti, oleh karena itu ini hal ini dapat menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan metode eksperimen

f. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil yang dijelaskan bahwa dari tabel-tabel yang telah ditampilkan pada pembahasan, diketahui bahwa masih banyak topik dalam akuntansi sektor publik yang masih jarang diteliti, padahal topik tersebut dapat menjadi hal yang menarik.

g. Kelebihan dan Kekurangan

Informasi yang disampaikan penulis dalam artikel ini sudah dijelaskan secara mendetai sehingga pembaca lebih paham terkait permasalahan pada penelitian ini. Namun, peneliti tidak menyampaikan tujuan dari penelitian ini.

h. Daftar Pustaka

Rizky, Harumi Puspa, & Doddy Setiawan. 2019. Perkembangan Penelitian Akutansi Sektor Publik Di Indonesia. *Jurnal Akutansi dan Pendidikan*, 8 (2), hlm 94-116.

ANALISIS JURNAL NASIONAL

ANALISIS JURNAL NASIONAL 1

a. Identitas Jurnal

1	Nama Jurnal	Pareso Jurnal
2	Judul	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
3	Nama Penulis	Cottalismewati, Rina Asmeri, dan Dica Lady Silvera
4	Halaman	149-168
5	Volume/No/Tahun Terbit	Vol.4/No.1/Maret 2022
6	e-ISSN	2656-8314

b. Abstrak

Abstrak dalam jurnal ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada bagian abstrak dijelaskan mengenai tujuan penelitian, subjek penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Kata Kunci: Pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, partisipasi dalam penganggaran, kinerja pemerintah daerah, Kabupaten Kepulauan Mentawai

c. Pendahuluan

Dalam bagian pendahuluan, penulis menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, keterlibatan berbagai komponen unit kerja dalam penyusunan anggaran di suatu instansi sangat diperlukan. Melihat persoalan tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan

daerah dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

d. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan pengaruh pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

e. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS Versi IBM 20 untuk pengolahan data.

f. Hasil dan Pembahasan

1. Terdapat pengaruh antara variabel pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini diketahui dari hasil uji t dimana t hitung $2,143 > t$ tabel $2,007$ dan nilai sig perhitungan $0,037 < 0,05$.
2. Terdapat pengaruh antara variabel sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini diketahui dari hasil uji t yang t hitung $4,895 > t$ tabel $2,007$ dan nilai sig perhitungan $0,000 < 0,05$.
3. Terdapat pengaruh antara variabel partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini diketahui dari hasil uji t yang t hitung $3,014 > t$ tabel sebesar $2,007$ dan nilai sig perhitungan $0,004 < 0,05$.
4. Diketahui berdasarkan hasil uji F bahwa variabel pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan partisipasi penyusunan anggaran secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini diketahui dari hasil uji F $102,672 > F$ tabel sebesar $4,02$ dan nilai sig perhitungan $0,000 < 0,05$.

g. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) dan Partisipasi Penyusunan Anggaran (X3) berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Y).

h. Kelebihan dan Kekurangan

Isi pendahuluan dalam jurnal terlalu banyak. Sebaiknya pendahuluan jurnal disajikan dengan pemilihan kata yang lebih ringkas dan fokus pada topik yang dikaji.

i. Daftar Pustaka

Cottalismewati, Asmeri, R., & Silvera, D.L. 2022. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Pareso Jurnal*, 4(1), 149-168.

ANALISIS JURNAL NASIONAL 2

a. Identitas Jurnal

1	Nama Jurnal	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika
2	Judul	Analisis Risiko dalam Akuntansi Sektor Publik pada Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Kalianget
3	Nama Penulis	Putu Yunik Widiarini dan I Gede Putu Banu Astawa
4	Halaman	71-82
5	Volume/No/Tahun Terbit	Vol.13/No.1/April 2023
6	e-ISSN	2599-2651

b. Abstrak

Abstrak dalam jurnal ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada bagian abstrak dijelaskan mengenai tujuan penelitian, subjek penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

Kata Kunci: Analisis risiko, akuntansi sektor publik, program BLT-DD

c. Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan penulis menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 mengakibatkan kondisi perekonomian semakin memburuk sehingga pemerintah harus memberikan perhatian serius dalam menyiapkan anggaran program jaring pengaman sosial. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Presiden Joko Widodo mengeluarkan program jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat desa yang bersumber dari dana desa. Regulasi mengenai pelaksanaan dana desa yang

beragam dan cepat berubah tidak menutup kemungkinan akan rentan terhadap risiko. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk menganalisis risiko yang terjadi dalam program BLT-DD di Desa Kalianget.

d. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko yang terjadi dalam program BLT di Desa Kalianget.

e. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh (Miles, 1992) mencakup tiga aktivitas meliputi:

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

f. Hasil dan Pembahasan

Risiko pelaksanaan program BLT-DD di Desa Kalianget dapat diidentifikasi melalui proses akuntansi sektor publik yang dijalankan. Berdasarkan observasi dan wawancara diketahui bahwa terdapat risiko pada tahap perencanaan yakni risiko keterlambatan pendataan. Pada tahap penganggaran terdapat risiko ketidaksesuaian alokasi anggaran dana desa dengan jumlah masyarakat miskin di desa. Selanjutnya pada proses realisasi anggaran adanya kemungkinan risiko yakni risiko ketidaksesuaian realisasi anggaran antara jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang diajukan dengan jumlah KPM yang menerima. Kemudian pada tahapan pelaporan pertanggungjawaban ditemukan adanya risiko keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban program BLT-DD. Tahapan pengawasan dapat diidentifikasi adanya risiko pengawasan dalam pelaksanaan BLT kurang optimal.

g. Kesimpulan dan Saran

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa risiko yang terjadi dalam program BLT di Desa Kalianget, Dari risiko-risiko tersebut, pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebaiknya menciptakan kebijakan mengenai bantuan sosial yang lebih disederhanakan agar dapat dipahami oleh perangkat desa sehingga dana bantuan bisa segera disalurkan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga harus

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sosialisasi mengenai tujuan, mekanisme, dan sasaran penerima BLT-DD.

h. Kelebihan dan Kekurangan

Terdapat beberapa pemilihan kata yang kurang tepat sehingga sulit untuk dipahami.

Sebaiknya penulis lebih memperhatikan pemilihan kata yang akan digunakan. i.

Daftar Pustaka

Widiarini, P.Y., & Astawa, I.G.P.B. 2023. Analisis Risiko dalam Akuntansi Sektor Publik pada Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Kalianget. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 13(1), 71-82.

ANALISIS JURNAL NASIONAL 3

a. Identitas Jurnal

1	Nama Jurnal	Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)
2	Judul	Implementasi Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintah
3	Nama Penulis	Arung Abinaya Nasrulloh, Zarah Eka Nur Saputri, dan Herlina Manurung
4	Halaman	44-55
5	Volume/No/Tahun Terbit	Vol.1/No.3/Juli 2023
6	e-ISSN	2614-820x

b. Abstrak

Abstrak dalam jurnal ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada bagian abstrak dijelaskan mengenai tujuan penelitian, subjek penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Kata Kunci: Implementasi pelaporan akuntansi sektor publik, pengendalian intern, akuntabilitas kinerja instansi

c. Pendahuluan

Dalam pendahuluan jurnal, penulis menjelaskan bahwa berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan di Kecamatan Lembursitu mununjukan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Lembursitu secara umum mengalami peningkatan dari 2019-2021. Namun, beberapa komponen penilaian aspek perencanaan kinerja dan evaluasi internal mengalami penurunan di tahun 2019-2020. Oleh karena itu, dalam jurnal ini penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi pelaporan akuntansi sektor publik dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah pada Kecamatan Lembursitu.

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk menjelaskan pengaruh implementasi pelaporan akuntansi sektor publik dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja di Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi.

e. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah metode kuantitatif asosiatif kausal. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lembursitu yang berada di Kota Sukabumi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuisioner dengan instrumen penelitian yang digunakan yaitu skala Likert.

f. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan pelaporan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilihat dari hasil pengujian data diperoleh nilai t-hitung = $5,909 > t\text{-tabel} = 2,019$, dengan nilai probabilitas $sig \ 0,000 < 0,05 (\alpha)$.
2. Pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilihat dari hasil pengujian data diperoleh nilai t-hitung = $-0,396 < t\text{-tabel} = 2,019$, dengan nilai probabilitas $sig \ 0,694 > 0,05 (\alpha)$.
3. Dalam Penelitian ini penerapan pelaporan akuntansi sektor publik dan pengendalian intern (X) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) hal ini dapat dilihat dari nilai f-hitung = $20,772 > f\text{-tabel} = 3,23$.

g. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil yang dijelaskan bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas ini mengidentifikasi bahwa SDM kecamatan Lembursitu belum memahami

tentang unsur-unsur pengendalian intern dan pengendalian resiko serta belum sempurnanya sistem pengendalian intern. Oleh sebab itu, penulis menyarankan untuk melakukan pemantapan dan pendalaman pemahaman kepada anggota satgas penyelenggara SPIP mengenai konsepsi atau unsur-unsur pengendalian inter dan melakukan penyempurnaan terhadap sistem pengendalian intern.

h. Kelebihan dan Kekurangan

Informasi yang disampaikan penulis dalam jurnal ini sudah lengkap. Namun, dalam sistematika penulisan masih ada beberapa penulisan kata dan tanda baca yang kurang tepat.

i. Daftar Pustaka

Nasrulloh, A.A., Saputri, Z.E.N., & Manurung, H. 2023. Implementasi Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(3), 44-55.

ANALISI JURNAL INTERNASIONAL

ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL 1 APPLICATION OF VALUE FOR MONEY IN ASSESSING PERFORMANCE IN PUBLIC SECTOR HOSPITALS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Keberhasilan sebuah rumah sakit sektor publik tidak dapat diukur semata-mata dari perspektif keuangan saja. Surplus ataupun defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi bahan tolak ukur keberhasilan suatu rumah sakit sektor publik. Karena sifatnya tidak mencari laba, maka keberhasilan dari rumah sakit sektor publik didapatkan dari keberhasilan dari pengukuran kinerjanya. Sebuah anggaran pada dasarnya hanyalah sebuah angka. Angka tersebut bukan hanya menyimpulkan surplus dan defisitnya secara kuantitatif. Anggaran pula dapat berupa kualitatif yang dapat menyimpulkan berapa besar keberhasilan kinerja tersebut dilakukan pada periode tertentu. Aspek pertanggungjawabannya bukan hanya berupa laporan keuangan, tetapi juga disertakan laporan kinerja. Rumah sakit sektor publik dipegang sepenuhnya oleh pemerintah dan menjadi rumah sakit pemerintah. Rumah sakit sektor publik terdiri dari dua bagian, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dan Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD). Kepuasan pasien merupakan indikator utama standar rumah sakit dan ukuran kualitas pelayanan.

Kepuasan pasien yang rendah mempengaruhi jumlah kunjungan rumah sakit, sedangkan sikap staf terhadap pasien dan tuntutannya terhadap kualitas pelayanan yang diberikan dapat meningkatkan dari waktu ke waktu. Salah satu penilaian yang dapat dipertimbangkan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan mengukur/mengevaluasi kinerja. Mengukur kinerja dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran dengan menggunakan sistem value for money.

Value For Money (VFM) merupakan konsep evaluasi kerja organisasi sektor publik yang dinilai berdasarkan tingkat keberhasilan program kerjanya. Value For Money merupakan indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya berupa ekonomi, efisien dan efektif. Value for money adalah jantung dari pengukuran kinerja organisasi pemerintah. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maximizing benefits and minimizing costs), secara efektif (berhasil guna) dalam arti tujuan dan sasaran. Konsep Value For Money terdiri dari tiga elemen utama, yaitu

- Ekonomi menurut (Mahmudi, 2007) bahwa pengertian ekonomi yaitu kaitannya dengan penggunaan input primer (anggaran atau kas) menjadi input reguler (tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal) yang dikonsumsi organisasi untuk melaksanakan kegiatan oerasional.
- Efisiensi menurut (Deddi Nordiawan, 2018) bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan oleh suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya.
- Efektivitas menurut (Deddi Nordiawan, 2018) adalah hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu

mampu menghasilkan output sebesar besarnya. METODE Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metodologi Systematic Literature Review (SLR). Systematic Literature Review adalah suatu penelitian dengan menggunakan pemrosesan untuk mengidentifikasi, menilai dan menafsirkan suatu fakta dan bukti yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

SUMBER: <http://jeinsa.com/index.php/jurnal/article/view/12>

ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL 2

STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK INTERNASIONAL (IPSASS): TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS DAN AGENDA PENELITIAN MASA DEPAN

Praktik akuntansi di sektor swasta dan publik saat ini ditujukan untuk harmonisasi internasional dan meminimalkan perbedaan pelaporan keuangan antar negara. Munculnya harmonisasi akuntansi di tingkat internasional ini sangat didorong oleh kebutuhan akan transparansi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik (Eulner & Waldbauer,2018), pemerataan antargenerasi, dan lebih banyak efisiensi dan efektivitas terkait pengeluaran publik (Heald & Hodges,2015). Harmonisasi akuntansi sektor publik di tingkat internasional saat ini diwujudkan dengan menerapkan IPSASs (Aggestam Pontoppidan&Andernack,2016; Bergmann,2009).

Lebih rinci, IPSASs adalah seperangkat standar berbasis akrual yang memberikan dasar yang seragam untuk penyusunan laporan keuangan tahunan di sektor publik. Standar tersebut dikembangkan, disempurnakan, dan diterbitkan oleh IPSASBoard, sebuah badan penetapan standar internasional yang terdiri dari, misalnya, perwakilan dari kementerian dan lembaga pemerintah, pengadilan audit, praktisi publik, dan akademisi. Selain itu, publik luas disapa dalam konsultasi publik untuk berpartisipasi dan mempengaruhi proses pengembangan standar dengan mengomentari draf pemaparan yang dipublikasikan selama proses yang seharusnya. Karena IPSAS dikeluarkan oleh Dewan IPSAS sebagai organ IFAC, baik pemerintah maupun organisasi internasional tidak diwajibkan untuk menerapkan IPSAS.

Secara umum, IPSAS diterapkan secara penuh atau sebagian oleh sekitar 80 negara, serta organisasi internasional seperti Komisi Eropa, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, OECD, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OECD/IFAC,2017). Selain perbedaan besar antar negara dalam hal praktik akuntansi, tingkat pemerintahan di dalam negara bervariasi dalam hal standar

akuntansi. Misalnya, Austria menerapkan sebagian IPSAS di tingkat pemerintah pusat. Namun, pemerintah kota Austria saat ini masih menggunakan standar akuntansi berbasis uang tunai. Singkatnya, implementasi IPSAS sangat bervariasi antar negara dan tingkat pemerintahan, dan ada juga perbedaan dalam jumlah IPSAS.

Banyak yang telah menggunakan teori yang berbeda untuk menjelaskan anteseden dan hasil adopsi IPSAS dan pengembangan sistem akuntansi menuju akuntansi akrual seperti IPSAS. Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi IPSAS telah dijelaskan oleh teori kelembagaan atau model kontingensi (misalnya, oleh Lüder,1992, 1994,2002). Ketika mempelajari implementasi akuntansi akrual berdasarkan IPSASs, banyak penulis telah menggunakan paradigma Manajemen Publik Baru (NPM) untuk menyatakan bahwa reformasi memodernisasi negara dan meningkatkan pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Lüder,2002).

Selanjutnya, teori pilihan publik (Buchanan,1972, 1978; Niskanen,1971, 1973) dan teori institusional digunakan oleh Pina et al. (2009), sedangkan Bunget, Blidisel, Feleaga, dan Popa (2014) mengacu pada teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan. Teori konsolidasi juga telah digunakan (Bergmann, Grossi, Rauskala, & Fuchs, 2016; Bisogno, Santis, & Tommasetti,2015). Untuk menjelaskan hasil adopsi IPSAS, studi mengandalkan NPM (misalnya, Bolivar & Galera,2016), model tong sampah (lihat Robb & Newberry,2007; Oulasvirta & Bailey,2016), teori ekonomi (lihat Bergmann,2012), atau pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian (lihat Fuchs, Bergmann, & Brusca,2017). Akhirnya, sejumlah besar artikel menggambarkan praktik akuntansi tanpa secara eksplisit mengacu pada teori.

Dalam berfokus pada reformasi akuntansi Portugis, Gomes, Fernandes, dan Carvalho (2015) mencirikan akuntansi sebagai praktik sosial dan kelembagaan karena kohesi di antara pemangku kepentingan tampaknya menjadi pendorong kesuksesan. Demikian pula, Brusca, Gómez Villegas, dan Montesinos (2016) menjelaskan penerapan IPSASs di Kolombia dan Peru dengan mengacu pada teori institusional dan menemukan bahwa kedua negara bertujuan modernisasi sistem akuntansi. Menurut Brusca, Montesinos, dan Chow (2013), keputusan pemerintah Spanyol untuk mengadopsi IPSAS dipengaruhi oleh tujuan politik dalam hal akuntabilitas sektor publik dan upaya promosi oleh Dewan IPSAS. Jones dan Caruana (2016) menjelaskan keputusan pemerintah pusat Malta untuk sepenuhnya mengadopsi IPSAS sebagai hasil mengejar kredibilitas. Chan (2016) menemukan bahwa keputusan pemerintah Cina untuk mengadopsi akuntansi akrual dapat dikaitkan dengan keinginan untuk menangkal utang

pemerintah daerah dan mengurangi risiko fiskal. Nistor dan Deaconu (2016) terkait adopsi Rumania akuntansi akrual dengan reformasi publik manajerial internasional dan faktor internal.

Sumber: Schmidhuber, Lisa. 2020. Standart Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAsS): Tinjauan Literatur Sistematis dan Agenda penelitian masa depan. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/faam.12265>. Diakses pada 21 November 2023.

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK (LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022)

a. Macam-Macam Laporan Keuangan 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	2.805.998.551.971,00	3.126.137.885.658,00	111,41	2.721.138.045.704,00
4	Pendapatan Bantuan Daerah	8.445.790.038,00	6.602.045.104,00	78,17	14.644.095.990,00
5	Pendapatan Dana Pengembangan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	307.386.042.306,74	40.568.759.794,74	13,82	33.305.967.755,00
6	Lain-lain Pendapatan Adi Daerah yang Sisa Jumlah Pendapatan Adi Daerah	602.818.461.519,00	499.953.704.973,97	85,43	480.531.777.812,97
7		3.794.650.843.884,74	3.676.302.294.580,71	97,19	3.249.669.847.265,00
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERUMAHAN				
10	Dana Bantuan Kesejahteraan Sosial				
11	Dana Bantuan Kesejahteraan Sosial	121.518.174.000,00	151.118.931.842,00	124,36	183.140.967.609,00
12	Dana Bantuan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Daya Alam)	62.259.393.000,00	102.319.151.262,00	161,73	42.401.390.558,00
13	Pendapatan Dana Alokasi Umum	1.726.296.248.000,00	1.719.175.460.727,00	99,99	1.726.296.248.000,00
14	Pendapatan Dana Alokasi Umum Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.190.889.241.000,00	1.126.520.932.623,00	97,93	2.252.553.475.742,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	3.061.863.056.000,00	3.499.137.376.399,00	101,23	4.184.372.482.000,00
16	Dana Otonomi Khusus				
17	Dana Otonomi Khusus	1.441.174.000,00	1.441.174.000,00	100,00	17.389.748.000,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	1.441.174.000,00	1.441.174.000,00	100,00	17.389.748.000,00
19	BANTUAN KEUANGAN				
20	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah				
21	Dana Bantuan Keuangan	21.045.816.320,00	18.325.039.496,00	85,19	7.374.451.000,00
22	Jumlah Bantuan Keuangan	21.045.816.320,00	18.325.039.496,00	85,19	7.374.451.000,00
23	Jumlah Pendapatan Transfer	2.084.450.046.320,00	2.118.930.389.890,00	101,12	4.309.154.682.000,00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hukuh	46.150.549.080,00	39.714.087.723,00	86,00	10.360.423.805,00
26	Pendapatan Lainnya	46.150.549.086,00	39.714.087.723,00	86,05	10.642.816.755,00
27	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	46.150.549.086,00	39.714.087.723,00	86,05	10.642.816.755,00
28	JUMLAH PENDAPATAN	6.915.281.441.290,74	6.836.946.972.193,71	98,87	7.469.469.346.029,06
29	BELANJA				
30	BELANJA OPERASI				
31	Belanja Operasi Pemerintah	2.094.516.010.862,00	1.970.948.686.655,00	96,38	1.938.738.007.314,27
32	Belanja Belanja dan Jasa	1.892.253.268.000,00	1.816.423.482.989,79	95,83	1.506.510.161.599,00
33	Belanja Bantuan	12.829.045.899,00	12.829.045.899,00	100,00	22.161.585.802,00
34	Belanja Bantuan				
35	Belanja Bantuan Sosial	618.979.397.863,00	587.127.478.959,82	95,63	1.682.887.289.922,12
36	Jumlah Belanja Bantuan Sosial	20.294.622.000,00	20.389.044.700,00	99,00	4.930.194.829,00
37	Jumlah Belanja Operasi	4.587.842.594.654,93	4.407.709.729.253,61	96,07	5.151.247.340.067,92
38	BELANJA MODAL				
39	Belanja Modal				
40	Belanja Modal	275.947.612.296,44	237.268.665.782,27	85,26	127.714.760.000,00
41	Belanja Pembelian dan Sewaan	301.902.259.299,00	284.635.263.069,95	94,26	185.470.211.390,00
42	Belanja Gending dan Pengamanan	533.254.740.600,00	481.854.158.205,13	90,36	240.978.531.324,00
43	Belanja Jalinan, irigasi dan jaringan	24.541.386.970,00	23.292.746.801,00	94,91	390.107.373.947,73
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	275.000.000,00	275.000.000,00	100,00	32.845.817.778,00
45	Jumlah Belanja Modal	1.328.980.999.468,44	1.028.220.883.958,33	90,26	849.692.114.832,21
46	BELANJA TAK TERDUGA				
47	Belanja Taks Terduga				
48	Belanja Taks Terduga	25.487.250.000,00	223.200.000,00	1,09	126.400.000,00
49	Jumlah Belanja Taks Terduga	20.487.250.000,00	223.200.000,00	1,09	126.400.000,00
50	JUMLAH BELANJA	8.744.310.844.123,37	8.433.289.123.211,94	94,09	8.001.065.854.900,13
51	TRANSFER				
52	Transfer/Bagi Hasil Ke Kabupaten/Kota	1.362.347.751.379,70	1.353.014.947.401,00	99,31	1.096.580.546.691,00
53	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kdby/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	141.176.332.104,00
54	JUMLAH BELANJA TRANSFER	1.362.447.751.379,70	1.353.114.947.401,00	99,31	1.096.580.546.691,00
55	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	7.106.758.395.503,07	6.796.374.070.612,94	95,49	7.097.631.401.591,13
56	SURPLUS/DEFISIT	(191.507.154.212,33)	50.572.901.580,77	(26,41)	371.817.944.437,92
57	PEMBIAYAAN				
58	PEMBIAYAAN PEMERINTAHAN				
59	Pembentukan Silpa	382.687.104.212,33	383.279.770.163,01	100,15	182.638.158.429,09
60	Pembentukan Pengelolaan Daerah				
61	Jumlah Pembentukan	382.687.154.212,33	383.279.770.163,01	100,15	182.638.158.429,09
62	PENGELUARAN PEMERINTAHAN				
63	Pengeluaran Model Pemerintahan Daerah	50.000.000.000,00	141.176.332.704,00	100,00	30.000.000.000,00
64	Pembentukan Pendapatan Utang	191.180.000.000,00	141.176.332.704,00	72,84	11.176.332.704,00
65	Jumlah Pengeluaran	191.507.154.212,33	242.103.437.459,01	126,42	31.146.182.729,09
66	PEMBIAYAAN NETTO				
67	BISA LEHIS PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	292.676.339.039,78		383.279.770.163,01

Lihat catatan akhir bagian bawah mengenai jumlah anggaran yang berlaku, kenyatakan dalam Segmen Berdasarkan sebagaimana ketentuan

GUBERNUR LAMPUNG


ARINAL DJUNAIDI

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG			
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021			
No.	URAIAN	2022	2021
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	383.279.770.163,01	190.917.719.139,04
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan	383.279.770.163,01	182.638.158.429,09
3.	Subtotal (1-2)		8.278.920.709,95
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembayaran Anggaran (SILPA/SIKPA)	292.676.339.039,78	383.279.770.163,01
5.	Subtotal (3+4)	292.676.339.039,78	391.558.690.872,96
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
7.	Lain-lain		
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	292.676.339.039,78	383.279.770.163,01

Lihat catatan atas laporan kesanggupan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan kesanggupan secara keseluruhan

GUBERNUR LAMPUNG

ARINAL DJUNAIDI

3. Neraca

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG NERACA			
Per 31 Desember 2022 dan 2021			
No.	URAIAN	2022	2021
1. ASET LANCAR			
2.	Kas di Kas Umum	197.550.256.377,73	219.673.534.356,09
3.	Kas di Rekening Pengeluaran	-	-400,05
4.	Kas di Rekening Penerimaan		
5.	Kas di BLUD	94.377.630.543,37	163.013.619.856,24
6.	Kas di Dinas/Dinas	15.424.644,00	1.821.274.299,34
7.	Kas Lainnya	925.581.872,27	722.817.729,29
8.	Setara Kas		
9.	Jumlah Jangka Pendek		
10.	Piutang Pajak	563.170.550,00	-
11.	Piutang Pajak Piutang Pajak	(2.813.802,72)	
12.	Piutang Pajak Netto	560.356.747,28	-
13.	Piutang Meterai	-	-
14.	Piutang Merekat		
15.	Piutang Meterai Netto		
16.	Piutang Mitra		
17.	Jumlah Piutang Dinsus	680.312.654.910	2.11.956.380,00
18.	Piutang Dinsus Pengguna Anggaran	8.864.267.500,00	88.299.028.802,27
19.	Piutang Dinas Lainnya Tagihan Pengguna Anggaran	(18.493.489,28)	(1.7.314.976,80)
20.	Piutang Dinas Lainnya Tagihan Pengguna Anggaran Netto	8.855.774.010,75	86.283.053.875,77
21.	Dugong Lainnya TPCK	1.511.134.210,00	1.511.134.210,00
22.	Piutang Dugong Lainnya TPCK Netto	87.876,57	9.937.800,00
23.	Piutang Lainnya	890.029.878.782,58	883.190.914.493,86
24.	Piutang Lainnya Piutang Lainnya	(329.630.285,49)	(4.000.011.586,78)
25.	Piutang Lainnya Lainnya	560.399.604,00	89.500.313,00
26.	Piutang Lainnya Lainnya Netto	64.706.211.939,93	98.329.758.939,63
27.	Jumlah Aset Lancar	4.47.294.206.512,35	572.390.805.763,49
28. INVESTASI JANGKA PANJANG			
29.	Investasi Non Permanen	7.459.468.260,00	8.134.867.0.710,02
30.	Investasi Permanen		
31.	Piutang Modal Permanen	620.723.613.427,81	559.933.260.096,17
32.	Investasi Permanen Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00
33.	Jumlah Investasi Jangka Panjang	661.404.827.686,82	571.934.426.311,69
34. ASET TETAP			
35.	Tanah	2.300.731.971.454,03	2.298.277.598.659,03
36.	Piutang dan Mewar	2.523.652.244.105,24	2.288.450.583.681,63
37.	Obligasi dan Efek	3.473.000.000,00	3.473.000.000,00
38.	Jumlah Efek dan Obligasi	5.993.652.244.105,24	4.951.112.583.559,63
39.	Aset tetap lainnya	207.224.431.142,65	204.368.517.594,60
40.	Koleksi dan perangko	600.000,00	600.000,00
41.	Alemanche Perangko	(61.016.000,00)	(61.016.000,00)
42.	Jumlah Aset Tetap	1.1.039.199.800.000,00	1.0.932.863.682.800,96
43. DATA CADANGAN			
44.	Data Cadangan	-	-
45.	Jumlah Data Cadangan	-	-
46. ASET LAINNYA			
47.	Tagihan Pengguna Anggaran	10.930.632.642.331,81	19.754.329.721,07
48.	Tagihan Pengguna Anggaran Lainnya	14.727.844.200,00	2.484.370,00
49.	Kontraktor Ongkos Pihak Ketiga		
50.	Aset Tidak Berwujud	2.345.200.408,00	20.571.920.902,00
51.	Aset Tidak Berwujud	11.200.000,00	11.200.000,00
52.	Aset Tidak Berwujud	2.345.200.408,00	20.571.920.902,00
53.	Aset Tidak Berwujud Netto	8.828.789.364,40	6.849.582.272,33
54.	Aset Lainnya	203.415.792.564,00	250.389.643.022,58
55.	Piutang dan Piutang Aset Lainnya	1.000.000,00	600.000,00
56.	Alemanche Perangko Aset Lainnya	(12.035.432.590,00)	(12.035.432.590,00)
57.	Aset Lainnya Netto	1.40.987.494.066,97	341.108.563.536,48
58.	Jumlah Aset Lainnya	12.392.486.030.558,34	11.837.519.488.112,62
59. JUMLAH ASET			

No.	URAIAN	2022	2021
61.	Kewajiban		
62.	Kewajiban Jangka Pendek		
63.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (DPK)	1.424.000.000,00	1.847.716.479,00
64.	Utang Pihak Ketiga	1.261.254.917,26	3.442.127.250,00
65.	Pendapatan Diterima Dimulai	105.892.243.536,00	167.263.263.747,00
66.	Biaya Lainnya Utang Jangka Panjang	92.000.000,00	79.000.000,00
67.	Utang Jangka Pendek Lainnya	747.659.560.981,82	630.432.322.001,60
68.	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	949.130.380.317,28	880.177.953.822,71
69. Kewajiban Jangka Panjang			
70.	Utang Pihak Ketiga	-	79.795.312.493,00
71.	Utang Luar Negeri		
72.	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	79.795.312.493,00	79.795.312.493,00
73. JUMLAH KEWAJIBAN			
74.	Ekuitas	11.333.275.750.041,00	10.877.344.221.796,91
75.	JUMLAH EKUITAS	11.333.275.750.041,00	10.877.344.221.796,90
76.	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12.392.486.030.558,34	11.837.519.488.112,60

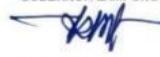
Lihat catatan atas laporan kesanggupan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan kesanggupan secara keseluruhan

GUBERNUR LAMPUNG

ARINAL DJUNAIDI

4. Laporan Operasional

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021				
URAIAN	BALDO 2022	BALDO 2021	Kenaikan / Penurunan	%
PENDAPATAN - LO	7.062.198.545.208,57	7.672.333.269.877,33	(613.571.109.531,76)	(8,00)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.797.963.810.987,08	3.349.195.361.004,79	445.232.065.119,29	13,29
Pendapatan Pajak Daerah - LO	3.139.368.612.707,00	2.753.022.778.250,00	385.782.663.902,00	14,01
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7.009.917.487,53	14.856.123.995,20	(7.846.206.507,67)	(52,81)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	136.358.936.626,38	87.827.369.082,26	48.531.568.544,12	55,26
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	315.226.344.160,17	493.489.090.672,33	18.764.039.180,84	3,80
PENDAPATAN TRANSFER - LO	3.140.802.649.944,00	4.200.843.389.286,00	(1.060.040.739.342,00)	(25,33)
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	3.121.802.649.944,00	4.179.843.389.286,00	(1.058.040.739.342,00)	(25,33)
Bantuan Pada Pemerintah Pusat	166.150.720.050,00	174.827.674.880,00	(8.676.954.830,00)	(4,96)
Dana Hukum Sosial Daren Alam	109.159.423.042,00	42.401.390.628,00	66.758.032.384,00	157,44
Dana Alokasi Umum	1.719.175.460.727,00	1.726.296.248.000,00	(7.120.787.273,00)	(0,41)
Dana Alokasi Khusus	1.126.520.832.623,00	2.232.553.876.742,00	(1.106.033.044.119,00)	(49,54)
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1.441.174.000,00	17.389.748.000,00	(15.948.574.000,00)	-
Dana Otomomi Khusus	-	17.389.748.000,00	(15.948.574.000,00)	-
Dana Pemerintahan	1.441.174.000,00	17.389.748.000,00	(15.948.574.000,00)	-
Bantuan Keuangan	18.358.039.496,00	7.374.451.000,00	10.980.588.496,00	148,90
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.355.039.496,00	7.374.451.000,00	10.980.588.496,00	148,90
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	123.432.084.277,49	123.194.519.586,54	1.237.564.090,95	1,01
Pendapatan Hibah	123.333.169.232,49	122.117.126.636,54	1.216.042.595,95	1,00
Pendapatan Lainnya	98.915.045,00	77.392.950,00	21.522.095,00	27,81
BEban	6.607.676.662.997,85	7.233.909.116.116,22	(623.066.295.353,40)	(8,61)
BERAN OPERASI	6.607.676.662.997,85	7.233.909.116.116,22	(623.066.295.353,40)	(8,61)
Beban Pergawai	1.953.165.466.009,00	1.964.392.784.812,97	(11.227.318.203,97)	(0,57)
Beban Persediaan	863.813.558.788,78	736.471.881.103,71	120.170.698.851,25	16,10
Beban Jasa	615.928.401.456,96	561.718.614.945,02	54.321.924.820,70	9,67
Beban Pemeliharaan	132.436.207.777,70	75.323.747.917,72	57.430.413.563,65	76,24
Beban Peralatan Dimas	187.834.786.703,20	150.032.999.938,00	37.801.786.765,20	25,20
Beban Biaya	11.071.204.480,00	20.422.920.820,00	(9.351.716.353,00)	(45,79)
Beban Hibah	631.589.273.483,74	1.736.187.138.830,12	(1.104.640.693.228,38)	(63,62)
Beban Bantuan Sosial	60.667.237.135,00	48.754.652.356,00	11.912.584.779,00	24,43
Beban Penyelesaian dan Amortisasi	615.372.363.308,78	611.631.667.541,65	3.740.695.767,13	0,61
Beban Penyelidikan Pustaka	1.574.281.061,18	1.245.285.707,02	305.667.722,52	24,56
Beban Transfer	1.501.686.683.313,00	1.278.247.901.125,00	223.438.782.188,00	17,48
Beban Lain-lain	32.507.199.480,51	39.476.519.506,01	(6.969.320.025,50)	(17,65)
SURPLUS / (DEFISIT) DARI OPERASI - LO	454.521.882.210,72	438.324.153.761,11	9.495.185.821,64	2,17
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASI				
Surplus Penjualan Aset Nonlancar				
Surplus Penyelesaian Kewilayah Jengka Pusone				
Defisit Penyelesaian Aset Nonlancar				
Defisit Penyelesaian Kewilayah Jengka Pusone				
SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	454.521.882.210,72	438.324.153.761,11	9.495.185.821,64	2,17
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa				
Defisit Luar Biasa				
POS LUAR BIASA				
SURPLUS / (DEFISIT) LO (59+64)	454.521.882.210,72	438.324.153.761,11	9.495.185.821,64	2,17
SURPLUS / (DEFISIT) LO (59+64)				

GUBERNUR LAMPUNG

ARINAL DJUNAIDI

5. Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG LAPORAN PERUBAHAN EQUITAS Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021				
No.	URAIAN	2022	2021	(dalam rupiah)
1. Ekuitas Awal		10.877.344.221.796,91	10.358.609.340.087,56	
2. Surplus / Defisit - LO		454.521.882.210,72	438.324.153.761,11	
3. Dampak Komulatif Perubahan Kebijaksanaan Mendasar		1.409.646.033,43	80.410.727.948,24	
4. Korrekt Nilai Persediaan		-	-	
5. Selisih Revaluasi Aset Tetap		17.567.180.961,05	94.255.447.900,00	
6. lain-lain		(16.157.534.927,62)	(13.844.719.951,76)	
7. Ekuitas Akhir		11.333.275.750.041,06	10.877.344.221.796,91	

GUBERNUR LAMPUNG

ARINAL DJUNAIDI

6. Laporan Arus Kas



**LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

No.	URAIAN		
		2022	2021
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	3.126.137.885.626,00	2.721.138.945.704,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	6.692.045.154,00	14.664.095.996,00
5	Penerimaan Penyaluran Dari Pengelolaan Kokayana Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000,00	33.348.000.000,00
6	Penerimaan Dari Pendapatan Aci Daerah yang Sah	470.937.821.194,97	475.591.016.955,97
7	Penerimaan Dara Bagi Hasil Pajak	151.118.931.842,00	183.140.967.649,00
8	Penerimaan Dara Bagi Hasil Sumber Daya Alam	162.319.151.202,00	42.461.390.655,00
9	Penerimaan Pendapatan Dara Alokasi Umum	1.719.175.466.727,00	1.726.296.248.000,00
10	Penerimaan Pendapatan Dara Alokasi Khusus	1.126.520.832.625,00	2.232.553.876.742,00
11	Penerimaan Dara Operasi Khusus		
12	Penerimaan Pendapatan Dara Penyosongan	1.441.174.000,00	17.389.748.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Dara Bagi Hasil Pajak		
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	39.714.087.723,00	10.565.423.805,00
15	Penerimaan Dara Darurat		
16	Penerimaan Bantuan Keuangan	18.355.039.496,00	7.374.451.000,00
17	Penerimaan Lainnya	-	77.392.950,00
18	Jumlah Arus Masuk Kas	4.867.891.088.566,71	7.464.328.385.152,95
20	Arus Keluar Kas		
21	Pembayaran Pegawai	1.970.940.686.655,00	1.934.759.007.514,97
22	Pembayaran Barang	1.816.423.482.089,79	1.506.510.161.999,03
23	Pembayaran Bunga	12.829.045.899,00	22.161.585.892,00
24	Pembayaran Hukam		
25	Pembayaran Bantuan Sosial	587.127.478.059,82	1.682.887.389.922,12
26	Pembayaran Tak Terduga	20.389.044.750,00	4.930.194.829,00
27	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	223.500.000,00	126.400.000,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan	1.353.014.947.401,00	1.096.385.546.691,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
30	Pembayaran Bantuan Keuangan		
31	Pembayaran Kejadian Lain Biasa	100.000.000,00	-
32	Pembayaran Jasa Tetap Lainnya		
33	Arus Kas Berulang Aset Kebutuhan	3.761.048.186.654,61	6.247.809.286.758,92
34	Arus Kas Berulang Aset Kebutuhan Operasional	1.848.842.981.706,10	1.216.368.298.393,13
35	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI DAN NON KEUANGAN		
36	Arus Masuk Kas		
37	Penerimaan Dana Cadangan		
38	Pengembalian Dana Cadangan	28.796.346.297,00	
39	Penerimaan Atas Peralatan dan Mesin	10.680.000,00	
40	Pengembalian Atas Gedung dan Bangunan	246.640.626,00	
41	Pengembalian Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
42	Pengembalian Aset Tetap Lainnya	295.000,00	
43	Hasil Penjualan Kokayana Daerah yang Dipisahkan		
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
45	Jumlah Arus Masuk Kas	29.853.883.833,00	4.940.760.877,00
47	Arus Keluar Kas		
48	Pembayaran Dana Cadangan		
49	Pembelian Tanah	-	127.714.760,00
50	Pembelian Peralatan dan Mesin	235.268.645.782,25	185.593.022.021,90
51	Pembelian Gedung dan Bangunan	294.635.293.069,95	240.978.511.324,58
52	Pembelian Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.000.000,00	39.900.000,00
53	Pembelian Aset Tetap Lainnya	23.292.746.101,00	32.846.817.778,00
54	Pembayaran Aset Lainnya	275.000.000,00	38.675.000,00
55	Pembayaran Modal Pemerintah Daerah	-	30.000.000.000,00
56	Pembayaran Pendapatan Investasi Non Permanen		
57	Pembayaran Pendapatan Lainnya		
58	Jumlah Arus Keluar Kas	1.025.322.883.958,33	879.692.114.832,21
59	Arus Kas Berulang Dari Aktivitas Investasi	(996.270.000,123,33)	(874.731.353.953,21)
60	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN DAN PEMERBIAHAYAAN		
61	Arus Masuk Kas		
62	Pengembalian Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		
63	Pengembalian Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		
64	Pengembalian Dalam Negeri - Lombaga Keuangan Bank		
65	Pengembalian Dalam Negeri - Lombaga Keuangan Bukan Bank		
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		
67	Pengembalian Pokok Pinjaman Dalam Negeri		
68	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
69	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
70	Pembentukan Dana Cadangan		
71	Pembentukan Modal Pemerintah Daerah		
72	Pengembalian Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		
73	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
74	Arus Keluar Kas		
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lombaga Keuangan Bank		
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lombaga Keuangan Bukan Bank	141.176.332.704,00	141.176.332.704,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Olehgaji		
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		
82	Pembayaran Kepada Perusahaan Negara		
83	Pembayaran Kepada Kepada Perusahaan Daerah		
84	Pembentukan Dana Cadangan		
85	Pembentukan Dana Cadangan		
86	Pembentukan Modal Pemerintah Daerah		
87	Jumlah Arus Keluar Kas	141.176.332.704,00	141.176.332.704,00
88	Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembahayaan	(141.176.332.704,00)	(141.176.332.704,00)
89	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN		
90	Arus Masuk Kas		
91	Penerimaan Perhitungan Pokok Ketiga	301.966.301.184,00	302.029.543.388,00
92	Jumlah Arus Masuk Kas	301.966.301.184,00	302.029.543.388,00
93	Arus Keluar Kas		
94	Penerimaan Perhitungan Pokok Ketiga	301.798.593.018,00	300.181.826.910,00
95	Jumlah Arus Keluar Kas	301.798.593.018,00	300.181.826.910,00
96	Arus Kas Berulang dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	(1.832.291.834,00)	1.847.716.478,00
97	Kredit/Klikas/Penerimaan Kas	(92.435.722.957,23)	282.489.328.211,92
98	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di BLUD dan di Bendahara Perenerimaan	305.221.746.641,01	182.975.905.717,04
99	Penerimaan Pengembalian Uang Jaminan	(12.150.000,00)	(337.777.287,90)
100	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di BLUD dan di Bendahara Perenerimaan	292.773.873.663,78	305.127.466.641,01
101	Kas di BUD	292.773.893.437,37	305.221.746.641,01
102	Kas di Bendahara Pengeluaran	197.555.256.377,73	219.673.534.356,00
103	Kas di Bendahara BOS	-	409,05
104	Kas di Bendahara Penerimaan	15.424.644,00	1.831.774.299,34
105	Kas di BLUD	94.377.620.543,37	163.013.619.856,24
106	Kas Lainnya	825.581.872,27	702.817.729,29
107	Setara Kas	-	

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara kesatuan

GUBERNUR LAMPUNG

ARINAL DJUNAIDI

No.	URAIAN	2022	2021
71	Penerimaan Dana Cadangan		
72	Hasil Penjualan Kokayana Daerah yang Dipisahkan		
73	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
74	Arus Keluar Kas		
75	Pembayaran Dana Cadangan		
76	Pembelian Peralatan dan Mesin	235.268.645.782,25	185.593.022.021,90
77	Pembelian Gedung dan Bangunan	294.635.293.069,95	240.978.511.324,58
78	Pembelian Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.000.000,00	39.900.000,00
79	Pembelian Aset Tetap Lainnya	23.292.746.101,00	32.846.817.778,00
80	Pembayaran Aset Lainnya	275.000.000,00	38.675.000,00
81	Pembayaran Modal Pemerintah Daerah	-	30.000.000.000,00
82	Pembayaran Pendapatan Investasi Non Permanen		
83	Pembayaran Pendapatan Lainnya		
84	Jumlah Arus Keluar Kas	141.176.332.704,00	141.176.332.704,00
85	Arus Kas Berulang dari Aktivitas Pendanaan	(141.176.332.704,00)	(141.176.332.704,00)
86	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN		
87	Arus Masuk Kas		
88	Penerimaan Perhitungan Pokok Ketiga	301.966.301.184,00	302.029.543.388,00
89	Jumlah Arus Masuk Kas	301.966.301.184,00	302.029.543.388,00
90	Arus Keluar Kas		
91	Penerimaan Perhitungan Pokok Ketiga	301.798.593.018,00	300.181.826.910,00
92	Jumlah Arus Keluar Kas	301.798.593.018,00	300.181.826.910,00
93	Arus Kas Berulang dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	(1.832.291.834,00)	1.847.716.478,00
94	Kredit/Klikas/Penerimaan Kas	(92.435.722.957,23)	282.489.328.211,92
95	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di BLUD dan di Bendahara Perenerimaan	305.221.746.641,01	182.975.905.717,04
96	Penerimaan Pengembalian Uang Jaminan	(12.150.000,00)	(337.777.287,90)
97	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di BLUD dan di Bendahara Perenerimaan	292.773.873.663,78	305.127.466.641,01
98	Kas di BUD	292.773.893.437,37	305.221.746.641,01
99	Kas di Bendahara Pengeluaran	197.555.256.377,73	219.673.534.356,00
100	Kas di Bendahara BOS	-	409,05
101	Kas di Bendahara Penerimaan	15.424.644,00	1.831.774.299,34
102	Kas di BLUD	94.377.620.543,37	163.013.619.856,24
103	Kas Lainnya	825.581.872,27	702.817.729,29
104	Setara Kas	-	

b. Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disebutkan di atas, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. BPK menekankan, Laporan Keuangan yang menjelaskan tentang Utang Dana Bagi Hasil Kabupaten atau Kota triwulan II, III, dan IV Tahun 2022 sebesar Rp606,69 miliar. Jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahun. Dana bagi hasil untuk triwulan II dan III adalah sebesar Rp318,29 miliar yang seharusnya telah dibayarkan pada tahun 2022. Namun, saldo Kas Daerah per 31 Desember 2022 hanya sebesar Rp197,56 miliar, sehingga apabila dana bagi hasil triwulan II dan III dibayarkan kepada Kabupaten atau Kota pada tahun 2022 maka akan terjadi defisit Kas Daerah sebesar Rp120,73 miliar. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga merealisasikan belanja tidak berdasarkan skala prioritas berupa Belanja Hibah sebesar Rp587,13 miliar. Hal tersebut juga mengurangi kemampuan Pemerintah Provinsi Lampung untuk membayar Dana Bagi Hasil. Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan manajemen kas secara memadai agar dapat menyalurkan dan bagi hasil kepada kabupaten atau kota secara tepat waktu dan mengurangi terjadinya defisit anggaran.

1. Rasio antar Pos Laporan Realisasi APBD a) Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \\ &= \frac{4.407.709.739.253,61}{5.433.259.123.211,94} \\ &= 81,12\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan, terlihat bahwa rasio belanja operasi terhadap total belanja adalah 81,12%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik.

b) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \\ &= \frac{1.025.325.883.958,33}{5.433.249.123.211,94} \\ &= 18,87\% \end{aligned}$$

Rasio belanja modal terhadap total belanja sebesar 18,87%, menunjukkan pembangunan fisik masih sangat perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.

c) Rasio PAD terhadap Total Pendapatan

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \\ &= \frac{3.678.302.294.580,71}{6.836.946.972.193,71} \\ &= 53,80\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Provinsi Lampung semakin membaik dari tahun sebelumnya.

d) Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \\ &= \frac{3.099.134.376.394}{6.836.946.972.193,71} \\ &= 45,32\% \end{aligned}$$

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Lampung semakin baik dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri.

e) *Debt Service Ratio (DSR)*

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Total Realisasi Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman}}{\text{Total Pendapatan}} \\ &= \frac{154.146.554.935,74}{6.836.946.972.193,71} \\ &= 2,25\% \end{aligned}$$

f) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{PAD} + \text{Bagian Daerah} + \text{DAU} - \text{Belanja Wajib}) - 2,5}{\text{P} + \text{BL}} \\ &= \frac{(3.678.302.294.580,71 + 1.379.958.915.667 + 1.719.175.460.727 - 4.407.709.739.253,61) - 2,5}{141.176.332.704 + 12.829.045.899} \\ &= 254,74\% \end{aligned}$$

2. Rasio antar Pos Neraca a) Rasio Cair (*Quick Ratio*)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Jangka Pendek}} \\ &= \frac{447.294.206.512,39 - 64.766.211.939,93}{949.130.280.317,28} \\ &= 40,30\% \end{aligned}$$

Apabila dilihat dari perhitungan di atas, maka Provinsi Lampung belum memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya karena aset yang dimiliki belum dapat menutupi seluruh utangnya.

b) Rasio Utang terhadap Aset (*Debt Ratio*)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \\ &= \frac{949.130.280.317,28}{12.282.486.030.358,34} \\ &= 7,73\% \end{aligned}$$

Menunjukkan bahwa kewajiban yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung relatif sangat kecil dalam sumbangannya untuk pembiayaan pembangunan.

c) Rasio Ekuitas terhadap Total Aset

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Total Aset}} \\ &= \frac{11.333.275.750.041,06}{12.282.486.030.358,34} \\ &= 92,27\% \end{aligned}$$

Menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Lampung sangat baik, artinya hampir seluruh kegiatan dibiayai sendiri.

SUMBER :

PPID Lampung. Laporan Keuangan Pemerintan Provinsi Lampung Tahun 2022 (Audited). Diakses pada 20 November 2023, dari ppid.lampungprov.go.id/page/Laporan-Keuangan-Pemerintah-Provinsi-Lampung.